



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FADHILAH**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN II**
3. NHK : **875438**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.530.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
2. Tanah Seluas 230 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
3. Tanah Seluas 427 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 342 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 235.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, IGNIS MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOBIL, KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 337.505.076**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.142.505.076



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.142.505.076

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.